BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 *North Atlantic Treaty Organization* (NATO)

3.1.1 Sejarah Terbentuknya NATO

Dimulai sejak tahun 1945 sampai dengan 1949, negara-negara Eropa bagian Barat dan aliansi-aliansinya di Amerika Serikat Utara menghadapi keadaan dengan kebutuhan mendasar untuk rekonstruksi ekonomi yang disebabkan oleh kekalahan yang mereka alami pada Perang Dunia II. Keadaan ekonomi yang buruk, disertai dengan demokrasi yang merapuh, membuat masyarakat berada dalam keadaan putus asa. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan keadaan *rival* Amerika Serikat, Uni Soviet, yang saat itu menjadi satu-satunya negara *superpower* di Dunia. Uni Soviet secara terang-terangan mengelola kekuatan militer secara maksimal. Hal ini membuat AS dan para sekutu khawatir akan kebijakan ekspansionis yang akan dilakukan oleh Uni Soviet.

Pada saat itu, Uni Soviet menunjukkan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kesepakatan internasional tidak menjadi jaminan akan kebebasan dan kedaulatan nasional negara-negara demokratis dari agresi dan subversi yang sewaktu-waktu bisa dilakukan dari pihak luar. Ideologi yang dipegang teguh oleh Uni Soviet saat itu pun menegaskan asumsi bahwa perselisihan yang tidak dapat dihindarkan antara kapitalisme dan sosialisme sebagai ancaman fatal bagi keamanan dan kehidupan nilai-nilai demokrasi yang ada di Barat (NATO *Handbook*, 2001: 29-30).

Keadaan yang memburuk pasca Perang Dunia II membuat negara-negara Eropa Barat tidak mungkin dapat menandingi kekuatan Uni Soviet pada saat itu, ditambah dengan tindakan Amerika Serikat untuk mengurangi jumlah pasukan militernya di Eropa yang memberi dampak langsung terhadap pertahanan di Eropa Barat yang bergantung pada kekuatan angkatan udara Amerika Serikat dan komponen-komponen nuklirnya (Kay, 1998: 13).

Beruntung bagi Eropa, karena Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill beranggapan bahwa Inggris dan Amerika Serikat seharusnya membangun dan membuat institusi penanganan perang yang terintegrasi dengan gabungan militer Inggris dan Amerika Serikat di dalamnya. Bahkan, di dalam salah satu pidatonya di Harvard University, Churchill menyampaikan:

> "Hal tersebut merupakan tindakan paling bodoh dan tindakan yang membuang-buang waktu untuk kedua pemerintahan, atau salah satunya, - untuk mencoba memecah mesin yang sudah berjalan mulus dan sangat kuat saat perang berakhir (Read: Uni Soviet)... Tetapi kami terikat untuk tetap bekerja dan dalam menjalankan tugas setelah perang - Mungkin untuk beberapa tahun ke depan" (Richard, 1986: 28).

Dengan begitu, terbentuklah sebuah grup keamanan di Eropa Barat yang bekerjasama dengan Persemakmuran Inggris dan Amerika Serikat. Kerjasama ini awalnya dimulai dari *Anglo-French Alliance* yang kemudian menggandeng Belgia, Belanda, Denmark, dan Jerman (Charles. 2003: 6).

Ketertarikan Uni Soviet terhadap Eropa Timur dan ketidakmampuan Inggris untuk mengimbangi *balance of power* Uni Soviet memunculkan kembali keterlibatan Amerika Serikat di dalam sektor keamanan. Pada tanggal 4 Maret 1947, Perancis dan Inggris menandatangani Traktat Dunkirk untuk meyakinkan

Jerman bahwa kedua negara ini akan memberikan bantuan dalam agresi Jerman dan akan bekerjasama dalam usaha rekonstruksi pasca perang.

Di Yunani pada tahun yang sama, penurunan pengaruh Inggris terlihat jelas, di mana adanya perang sipil antara monarki Yunani yang berpihak pada negara-negara Barat dengan pemberontak yang lebih condong kepada Uni Soviet dan komunis. Melihat hal tersebut, Amerika Serikat langsung merespon hal ini dengan mencetuskan *Truman Doctrine* pada tanggal 12 Maret 1947 dimana Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Harry S. Truman menjanjikan bantuan dari Amerika Serikat untuk Yunani dan Turki, didasari oleh prinsip-prinsip kebebasan, demokrasi dan perdamaian (*Public Papers of the Presidents*, 1963: 178-179).

Kemudian, sekretaris pertahanan Amerika Serikat, George Marshall, mengundang negara-negara Eropa untuk membuat perencanaan usaha pemulihan Eropa dengan menawarkan bantuan untuk melawan kelaparan, kemiskinan, depresi, dan kekacauan. Hal ini disambut baik oleh Inggris, Perancis Belgia, Belanda, dan Luxemborg (Selanjutnya disebut Banelux). Mereka mengadakan konferensi *Committee of European Economic Cooperation*, di Paris pada tangal 27 Juni sampai 2 Juli 1947 untuk mendiskusikan program terkordinir tentang kerjasama ekonomi yang berfokus pada pemulihan ekonomi yang terintegrasi. Namun, tujuan sebenarnya dari program ini adalah untuk mempromosikan kebebasan dari (bukan ketergantungan kepada) Amerika Serikat (http://www.nato.int/history/index.html, diakses pada tanggal 26 Mei 2012).

3.1.1.1 Traktat Pembentuk NATO

Setelah dimulai dari program Marshall Plan dan didasari juga oleh artikel 51 dari Piagam PBB yang berbunyi “Tidak terdapat hal yang akan merugikan hak yang melekat pada individu atau kolektif pada Piagam ini jika serangan bersenjata terjadi terhadap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kebijakan yang diambil oleh Anggota dalam pelaksanaan hak untuk membela diri harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan berdasarkan Piagam agar dapat mengambil tindakan setiap saat jika dianggap perlu untuk mempertahankan atau mengembalikan kedamaian dan keamanan internasional. Serangkain traktat bermunculan, dimulai dari Traktat Rio pada tahun 1947 yang merupakan pakta pertahanan bersama negara-negara Amerika Serikat.

Traktat Rio atau biasa dikenal juga dengan nama *Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance* merupakan traktat yang mengatur tentang persetujuan keamanan dimana sebuah serangan kepada salah satu negara anggota dipandang sebagai serangan kepada keseluruhan negara anggota. Traktat ini ditandatangani oleh Amerika Serikat dan sembilan belas negara-negara Amerika Serikat Latin di dalam *Inter-American Conference for Maintenance of Continental Peace and Security* yang berlangsung pada tanggal 15 Agustus sampai 2 September 1947 di Rio de Janeiro, Brazil. Traktat Rio ini menunjukkan pada dunia internasional bahwa Amerika Serikat menyetujui institusi keamanan kawasan sebagai basis keterlibatan Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Traktat ini sesuai dengan

Artikel 51 pada traktat PBB yang memberi jaminan hak individu atau *collective self-defense*.

Sekalipun traktat ini dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara Amerika Serikat, namun traktat ini mendukung kemungkinan munculnya implikasi yang lebih luas untuk menggalakan keamanan di Eropa yang merupakan kawasan esensial bagi Amerika Serikat. Menurut pandangan pemerintah Amerika Serikat pada masa itu, ancaman keamanan di kawasan Eropa lebih pelik jika dibandingkan dengan invasi langsung oleh Uni Soviet dengan pertimbangan saat demokrasi di Eropa sedang goyah ditambah dengan keadaan ekonomi yang sangat buruk pasca perang, diperlukan stabilitas untuk menghadapi tantangan politis yang dapat mengundang masuknya komunisme ke dalam Eropa (Kay, 1998: 15-16).

Selanjutnya Pakta Brussels pada tahun 1948 yang menghasilkan *Western European Union* (WEU)**.** George Marshall dan *secretary of British State for foreign affairs*, Ernest Bevin sepakat bahwa Eropa seharusnya menginstitusikan sebuah komunitas pertahanan di Eropa bagian barat untuk kepentingan perlindungan mereka sendiri, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat.

Menurut pendapat Bevin, untuk mencegah masuknya Soviet di barat, selain diperlukan juga pertahanan di kawasan tersebut dalam bentuk pembuatan sistem demokratis yang mengikutsertakan negara-negara Skandinavia, negara-negara lemah, Perancis, Italia, Yunani, Portugal, dengan dorongan Amerika Serikat dan juga mengikutsertakan Spanyol dan Jerman (Charles 1969: 92-93).

John Hickerson yang pada saat itu menjabat sebagai *Director of the State Department's Office of European Affairs* menambahkan bahwa jika Amerika Serikat sendiri yang bergerak tanpa ada organisasi Eropa yang berdiri sendiri, maka target untuk memelihara keamanan dan stabilitas di Eropa akan terhambat, begitupun ketika terbentuk organisasi Eropa yang berdiri sendiri namun tanpa ada dukungan dari Amerika Serikat, maka hal itu akan menjadi percuma. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Perdana Menteri Belgia pada saat itu, Paul-Henri Spaak: "Setiap pengaturan pertahanan yang tidak melibatkan Amerika Serikat akan menjadi hal tanpa nilai praktis."

Penyebab terhambatnya pendirian organisasi Eropa yang mandiri karena adanya faktor seperti: permasalahan antara dua negara besar di Eropa yaitu Perancis dan Jerman hingga akhirnya pada akhir Februari, ditambah lagi terjadinya perang saudara di Yunani, kemungkinan menangnya pihak komunis pada pemilu yang akan dilakukan di Italia pada Bulan April, dan tekanan Soviet di Finlandia dan Norwegia (Kay, 1998: 18).

Perancis dihadapkan pada pilihan yang sulit, sehingga akhirnya memutuskan untuk mencari jaminan keamanan dari Inggris dan Amerika Serikat, seperti apa yang disampaikan oleh nasionalis dari Perancis, Charles de Gaulle, pada tanggal 7 Maret 1948:

> "Diperlukan tindakan untuk membentuk hubungan antara negara-negara Eropa yang bebas dari sebuah ekonomi diplomatik, strategis pengelompokan, produksi gabungan, uang, tindakan eksterior, dan cara pertahanan mereka ... Perlu dilihat bahwa upaya Eropa dan Amerika yang bergabung untuk menempatkan kembali dunia pada posisi di bawah kaki mereka. Dukungan mereka dengan memberikan pertahanan dengan cara yang tepat dan tegas di satu sisi ,seperti yang tertulis dalam proyek Marshall."

Dari kekhawatiran tersebut, disepakati sebuah institusi keamanan Eropa Barat di Brussels oleh Inggris Raya, Perancis dan negara-negara Benelux pada tanggal 17 Maret 1948 dengan nama *Western European Union* (WEU) yang mempromosikan integrasi dan bantuan dalam sektor politik, ekonomi dan militer.

Masyarakat Eropa sadar perlunya kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan ancaman keamanan. Oleh karenanya, mereka menyepakati isi artikel empat Traktat Brussels yang menyatakan bahwa jika terjadi serangan di salah satu negara anggota, maka negara anggota lain akan membantu dalam bentuk serangan militer maupun bantuan lain seperti yang terdapat pada artikel 51 dari Piagam PBB.

Traktat Brussels merupakan bukti kemajuan substansial yang dicapai *European Union* (WEU) dalam pembagian tujuan keamanan nasional yang gagal diterapkan oleh Liga Bangsa-Bangsa tiga puluh tahun yang lalu. Mereka percaya bahwa aliansi ini akan mencapai sukses karena dibentuk berdasarkan power kesamaan kepentingan antara Amerika Serikat dan WEU.

Pada tahun 1949, dirampungkan dengan Traktat Atlantik Utara yang ditandatangani oleh dua belas negara pada tahun 1949 untuk menyetujui adanya pertahanan kolektif. Pengaruh Uni Soviet yang semakin menguat di Jerman, dan disertai terjadinya blokade Berlin oleh Uni Soviet, mendorong dimulainya diskusi antara Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara WEU tentang pertahanan kawasan Atlantik Utara di Washington pada tanggal 6 Juli, diskusi tersebut menegosiasikan tentang *basic scope* dan struktur aliansi Atlantik Utara.

Hasil diskusi tersebut adalah *Washington Paper* yang berisi konsesus tentang keanggotaan aliansi. Tiga bulan setelah pertemuan pertama, negosiasi lebih mendalam tentang Traktat Atlantik Utara dilanjutkan pada tanggal 10 Desember.

Pada tanggal 15 Maret di tahun berikutnya, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia dan Portugal diundang untuk ikut berpartisipasi dalam Traktat Atlantik Utara. Traktat Atlantik Utara sempat dituntut oleh Soviet karena dianggap bertentangan dengan Piagam PBB, namun hal tersebut disangkal oleh negara Atlantik Utara pada tanggal 2 April, dan akhirnya pada tanggal 4 April 1949, ditandatanganilah Traktat Atlantik Utara di Washington oleh Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.

Traktat Atlantik Utara menampung hak individu masyarakat masing masing negara anggota sekaligus mengatur kewajiban mereka menurut Piagam PBB. Seperti yang tercantum di dalam *perambulatory* nya:

> “Para pihak pada perjanjian ini menegaskan kembali kepercayaan mereka kepada tujuan dan prinsip Piagam PBB dan keinginan mereka untuk hidup damai dengan semua bangsa dan semua pemerintah. Mereka bertekad untuk menjaga kebebasan, warisan bersama dan peradaban rakyat mereka, didirikan pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu dan aturan hukum. Mereka berusaha untuk meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan di daerah Atlantik Utara dan memutuskan untuk menyatukan upaya mereka untuk pertahanan kolektif dan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan"

Traktat ini menginginkan negara anggotanya untuk berkomitmen pada artikel-artikel dalam traktat yang tujuan dan prinsipnya disesuaikan dengan isi Piagam PBB untuk kebebasan dalam mendapatkan keamanan berdasarkan prinsip demokrasi dan kebebasan individual melalui *collective defense*.

Namun, jika dilihat dari desain fondasinya, NATO bukan hanya sekedar aliansi militer untuk menghadapi Uni Soviet, melainkan juga sebuah institusi yang bertujuan untuk memastikan keutuhan nilai-nilai liberal-demokratis di negara-negara Euro-Atlantik. Pada saat itu, Inggris, Kanada dan Amerika Serikat berdiskusi dengan Pentagon mengenai sektor keamanan tentang pembuatan institusi trans-atlantik yang formal berdasarkan Pakta Brussels atau Traktat Rio sebagai alternatif untuk menggantikan peran PBB yang lumpuh disaat perang dingin.

Oleh karena itul, Eropa, terutama Eropa Barat dan pakta pertahanan Trans-Atlantik tidak bisa dipisahkan sama sekali. Sejak awal terbentuknya NATO yang diprakarsai oleh negara-negara Amerika Serikat Utara dan juga dua belas negara-negara Eropa Barat yang menandatangani Traktat Atlantik di Washington, D.C. yang menekankan pada artikel 4 yang berbunyi:

> "Jika setiap anggota menjadi obyek serangan di Eropa, maka anggota yang lain akan –sesuai dengan ketentuan Pasal 51 dari Piagam PBB- bertindak secara kolektif untuk membalas peperangan dengan semua bantuan militer dan kekuasaan yang mereka miliki"

Ditekankan lagi pada artikel selanjutnya yaitu artikel 5 bahwa ″Sebuah serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua.″

Pada dasarnya, negara-negara yang tergabung dalam NATO beranggapan bahwa ancaman konfrontasi militer dengan Uni Soviat sebenarnya tidak lebih mengkhawatirkan dari bahaya yang dihadapi jika kekuatan komunis menggerogoti masyarakat yang keadaannya sedang melemah di negara-negara Eropa Barat.

Namun pada kenyatannya, aliansi ini sebenarnya belum sepenuhnya siap untuk membawa misi mengamankan territorial Eropa sekaligus Amerika Serikat dikarenakan kurangnya pasukan dan peralatan militer yang memadai dan tidak ada struktur komando langsung untuk mengontrol pertahanan di Eropa. Namun hal ini segera berubah ketika terjadinya Perang Korea (*Korean War*) di tahun 1950.

Perang tersebut memaksa negara-negara yang beraliansi ini untuk meningkatkan usaha mereka di bidang pertahanan dimulai dengan membuat struktur militer yang terintegrasi dengan semua komando NATO di seluruh bagian Eropa (terutama Eropa Barat) (http://www.state.gov/www/regions/eur/nato /9904nato_index.html#chron, diakses pada 29 April 2011, pukul 03:34).

3.1.2 Keanggotaan dan Perluasan NATO

Pada awal didirikan, NATO beranggotakan 12 negara saja yaitu Belgia, Kanada, Denmak, Perancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris Raya dan Amerika Serikat. Seiring perkembangannya, dan didukung oleh *'open door policy'*, kini NATO memiliki 28 negara anggota.

Perluasan NATO Pada Masa Perang Dingin ditentukan oleh kriteria yang tercantum di dalam Traktat Washington, yaitu: negara anggota harus merupakan negara demokratis, memiliki pasar ekonomi, melindungi kebebasan dan hak asasi manusia di dalam perbatasan mereka, dan berkomitmen untuk bertanggung jawab akan kebijakan keamanan di luar batas negara mereka.

Perluasan pertama yang dilakukan NATO dimulai pada tahun 1952, memasukkan Yunani dan Turki menjadi negara anggota. Tujuan NATO memasukkan kedua negara ini menjadi anggota adalah untuk memperluas keamanan dan stabilitas di Eropa bagian tenggara.

Perluasan kedua dilakukan tiga tahun kemudian, pada tahun 1955 dengan memasukkan Jerman Barat ke dalam aliansi. *Perluasan ketiga* memiliki jarak yang cukup jauh dari perluasan terakhir yang dilakukan yaitu pada tahun 1982 memasukkan Jerman Timur yang masih dikuasai Soviet.

Spanyol masuk menjadi anggota kelima belas aliansi ini. Selain ketiga perluasan yang disebut di atas, ada satu perluasan lagi yang sebenarnya terjadi di dalam NATO, yaitu bergabungnya Jerman Timur menjadi anggota NATO. Hal ini terjadi seiring dengan bersatunya Jerman Barat dan Timur.

Putaran selanjutnya dari perluasan NATO terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin. Perluasan keanggotaan NATO ini didiskusikan dalam *Brussels Summit* di tahun 1994 untuk mempromosikan komunitas keamanan di Eropa Tengah dan Eropa Timur dengan mengkonsolidasikan demokrasi dan memperbaiki stabilitas. Beberapa negara Eropa Tengah pun setuju dan memutuskan bahwa masa depan kepentingan keamanan mereka didapatkan dengan cara bergabung dengan NATO.

Di masa setelah Perang Dingin ini, terbagi menjadi dua fase utama, yaitu: (1) berdasarkan *Study on NATO Enlargement* (Kajian Perluasan NATO); dan (2) berdasarkan *Membership Action Plan* (Rencana Aksi Keanggotaan) yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kajian Perluasan NATO

Di tahun 1995, NATO mengeluarkan dan mempublikasikan hasil dari *Study on NATO Enlargement* sebagai pertimbangan perluasan yang dilakukan. Dokumen ini menyimpulkan bahwa keamanan yang lebih baik di seluruh kawasan *Euro-Atlantic* dan perluasan NATO dapat memperkuat stabilitas dan keamanan kawasan. Berdasarkan studi tersebut, negara yang berminat untuk masuk ke dalam NATO harus dapat menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang diberikan yaitu: (1) Merepresentasikan fungsi demokrasi; (2) Memberlakukan sistem politik berdasarkan ekonomi pasar; (3) Memperlakukan minoritas sesuai dengan OSCE; (4) Menyelesaikan permasalahan dengan negara tetangga dan memiliki komitmen penuh pada penyelesaian permasalahan secara damai; (5) Memiliki kemampuan dan kemauan untuk memberi kontribusi militer pada aliansi; (6) Berkomitmen untuk membuat hubungan sipil dan militer yang demokratis dan struktur institusional.

Peresmian perluasan anggota ini ditandai dengan mengundang Polandia, Hungaria dan Republik Ceko untuk menegosiasikan keanggotaan mereka dengan mendatangi *Madrid Summit* pada tahun 1997. Setelah itu, pada bulan Maret 1999, *Perluasan keempat* memasukkan Republik Ceko, Hungaria dan Polandia menjadi anggota NATO.

2. *Membership Action Plan* (MAP)/Rencana Aksi Keanggotaan NATO

Di tahun yang sama pada bulan April, NATO menyelenggarakan *Washington Summit*, sekaligus mengenalkan MAP untuk meyakinkan sembilan negara calon anggota baru NATO bahwa Artikel 10 dan *open door policy* NATO dapat

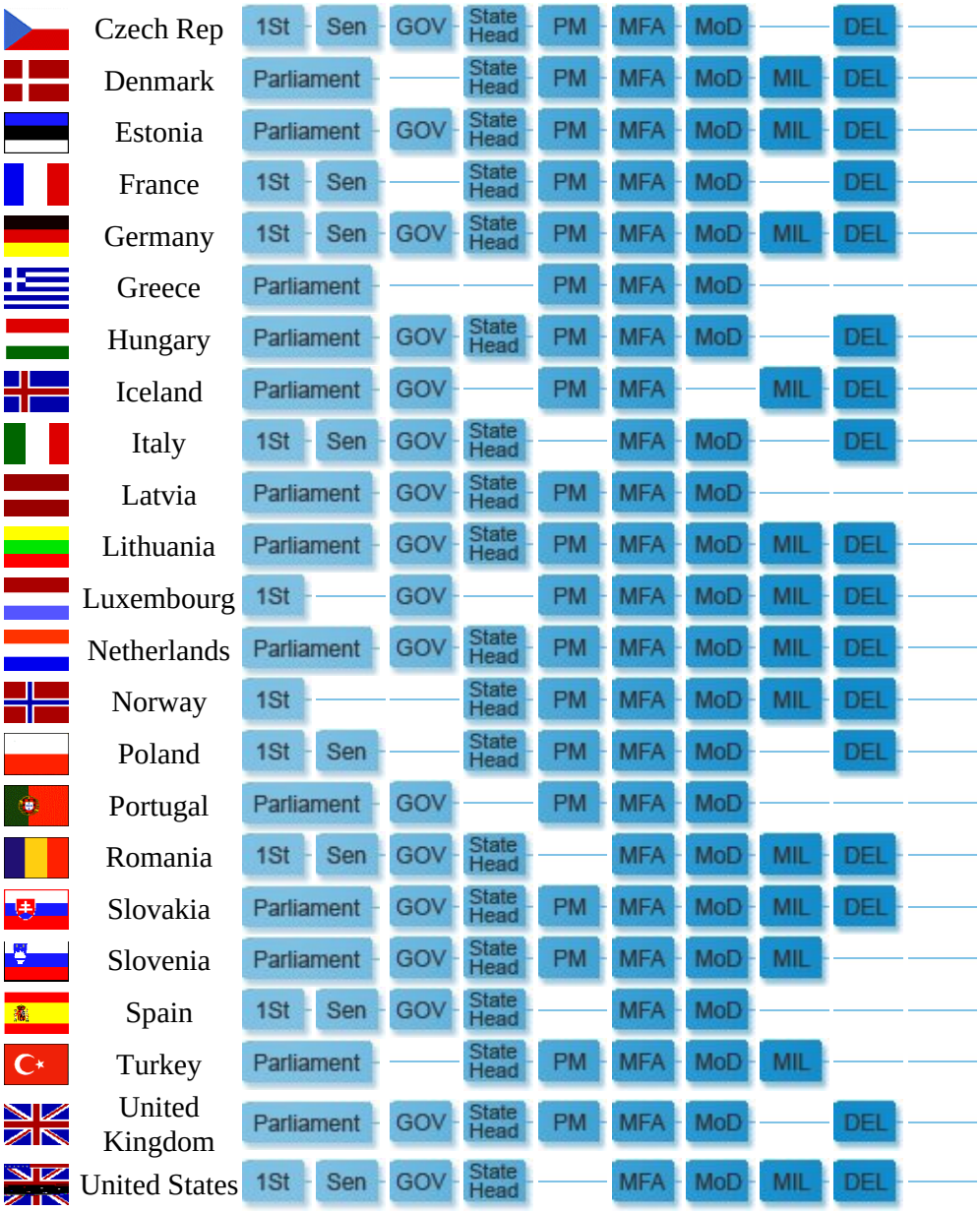
membantu calon-calon tersebut mengembangkan pasukan dan kemampuan untuk beroperasi dengan NATO dibawah *Operational Capabilities Concept* baru NATO. MAP dibagi menjadi lima bagian, yaitu: (1) Isu ekonomi dan politik; (2) Isu pertahanan dan militer; (3) Isu sumber daya; dan (4) Isu hukum.

Dengan adanya MAP, semua negara yang akan mendaftar menjadi anggota baru NATO akan diseleksi berdasarkan MAP. Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia dan Slovenia bergabung dalam MAP dan mengajukan diri untuk menjadi anggota baru NATO.

Perluasan kelima dilakukan pada bulan November 2002 di *Prague Summit*, dimana tujuh negara pecahan Uni Soviet diundang untuk mengikuti *accession talks* dan pada tanggal 29 Maret 2004, mereka resmi menjadi anggota NATO. *Perluasan keenam* yang dilakukan NATO adalah memasukkan Kroasia dan Albania ke dalam keanggotaan baru NATO pada tanggal 1 April 2009 setelah diundang dalam *Bucharest Summit* untuk memulai *accession talks*. Berikut adalah gambar anggota NATO pada tahun 2012:

Tabel 3.1 Negara-negara Anggota NATO





Legend

1St	Parliament, 1st Chamber	MFA	Ministry of Foreign Affairs
Sen	Senate, 2nd Chamber	MoD	Ministry/Department of Defence
GOV	Government	MIL	Military / Chief of Staff
State Head	Head of State / President	DEL	National Mission or Delegation to NATO
PM	Prime Minister	Info	Information Centre

(http://www.nato.int/cps/en/SID-67F8A474FCDA6F47/natolive/natocountries .htm, di unduh pada tanggal 26 Mei 2012).

3.1.3 Struktur NATO

Traktat Atlantik Utara merupakan awal dari terbentuknya NATO yang memiliki tiga jenis struktur besar yaitu *Civilian Structure* (Struktur Sipil), *Military Structure* (Struktur Militer), *Organizations and Agencies*. Struktur-struktur ini saling berhubungan dan sudah memiliki pembagian tugas masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Ketiga struktur diatas akan dijelaskan di dalam sub-bab sebagai berikut:

3.1.3.1 *Civilian Structure* (Struktur Sipil)

Ada tiga bagian besar di dalam struktur sipil NATO, yaitu *NATO headquarters* (markas besar Organisasi Traktat Atlantik Utara), *permanent representatives and national delegations* (perwakilan permanen dan delegasi nasional), dan *international staffs* (staf internasional / IS) yang akan dijelaskan dibawah ini:

Markas Besar NATO berada di Brussels, tempat menampung para perwakilan permanen dan delegasi nasional juga para staf internasional.

Permanent representatives and national delegations adalah perwakilan dari setiap negara anggota NATO yang didukung oleh delegasi nasional yang berisi penasiat dan pejabat yang mewakili negara mereka atau komite NATO yang lain. Di dalam struktur sipil ini juga terdapat Sekretaris Jenderal yang menjabat ketua Dewan Atlantik Utara (*Nort Atlantic Council/NAC*), komite perencanaan

pertahanan (*Defence Planning Committee / DPC*), dan grup perencanaan nuklir (*Nuclear Planning Group / NPG*). Sekretaris Jenderal NATO juga merupakan ketua dari *Euro-Atlantic Partnership Council of the Mediterranean Cooperation Group*, dan *Joint Chairman of Russia* dan perwakilan NATO dalam *NATO Russia Permanent Joint Council*. Sekjen juga menjadi *Joint Chairman dalam NATO Ukraine Commission* dan bertanggung jawab untuk mempromosikan serta mengarahkan proses konsultasi dan pembuatan keputusan kepada seluruh aliansi. Sekjen dapat mengajukan tema diskusi dan keputusan dan memiliki otoritas untuk menugaskan pejabat-pejabatnya jika ada pertikaian diantara negara-negara anggota. Ia pun bertanggung jawab untuk mengarahkan staf internasional dan juga menjabat sebagai *principal spokesman* dari NATO dalam hubungan eksternal, dan menjalin komunikasi dengan pemerintah negara anggota juga dengan media massa.175 Sekjen NATO juga bertanggung jawab untuk mengarahkan staff internasional secara keseluruhan.

Staf Internasional bertugas langsung dibawah Sekjen NATO dan beranggotakan dari masing-masing negara anggota yang bertugas untuk melayani Dewan, Komite dan *Working Groups* dari NATO itu sendiri, melayani Dewan Kerjasama *Euro-Atlantic*, Dewan Gabungan Permanen NATO-Russia, Komisi NATO Ukraina dan Grup Kerjasama Mediterranea. Staf ini berperan sebagai sekretaria sekaligus penasihat politik dan staf operasional dan bekerja berdasarkan berbagai macam isu yang berhubungan dengan aliansi dan negara partnernya.

Staff internasional juga mendukung proses *consensus-building* dan pengambilan keputusan antara anggota dan negara partner dan bertanggung jawab

untuk persiapan dan *follow-up* dari pertemuan dan kebijakan yang diambil dari komite NATO dan institusi lain dalam bentuk kerjasama bilateral ataupun multilateral dengan negara-negara non-anggota yang ada sejak berakhirnya perang dingin.

Staf Internasional membawahi *Private Office* (PO) yang berisi *Legal Adviser* dan *Special Adviser* untuk permasalahan Eropa Tengah dan Eropa Barat, termasuk di dalamnya terdapat *Partnership for Peace* (PfP) yang merupakan sebuah program kerjasama bilateral antara NATO dan partner kerjasamanya untuk meningkatkan sabilitas, meminimalisir ancaman, dan memperkuat kerjasama keamanan diantara mereka.

PfP bahkan dimasukkan ke dalam pertemuan Lisbon pada bulan November 2010 sebagai bagian yang fokus dalam membentuk ulang sebuah kebijakan kerjasama yang lebih efisien dan fleksibel, dan dapat membuka aktivitas kerjasama untuk mengharmonisasikan program kerjasama yang ada (http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm, diakses pada tanggal 1 Juni 2011, pukul 21:25).

3.1.3.2. *Military Structure* (Struktur Militer)

Ada empat bagian besar di dalam struktur militer NATO yaitu *The Military Committee* (komite militer), *Strategic Commanders* (komando strategis), *International Military Staff* (staff militer internasional), dan *Partner Country Representation* (perwakilan negara partner).

Komite Militer di dalam NATO bertugas untuk membantu dan member saran kepada Dewan Atlantik Utara, DPC dan NPG dalam urusan militer, peran utamanya adalah menyediakan pengarahan dan saran berkenaan dengan kebijakan dan strategi militer, juga menyediakan petunjuk tentang permasalahan militer kepada Komando Strategi NATO.

Terdapat dua Komando Strategis di dalam NATO, yang pertama dinamai *Supreme Allied Commander Europe* (SACEUR) dan yang kedua adalah *Supreme Allied Commander Atlantic* (SACLANT). Keduanya bertanggung jawab pada Komite Militer untuk semua perintah dari semua aliansi militer di area komando mereka.

Staf Militer Internasional bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkaji dan merekomendasikan kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan militer untuk dipertimbangkan oleh Komite Militer, juga untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang nantinya berlaku diimplementasikan sebagaimana wajarnya. IMS memiliki beberapa divisi di bawahnya yaitu: (1) *Plans and Policy Division*; (2) *Operations Division*; (3) *Intelligence Division; (4) Cooperation and Regional Security Division; (5) Logistics, Armaments and Resources Division (LA&R); (6) NATO Situation Centre; (7) Public Information Adviser; (8) Financial Controller; (9) NATO HQ Consultation, Control and Communications Staff (NHQC3S).*

Perwakilan Negara Partner termasuk di dalamnya *Partnership for Peace Staff Elements* yang berisikan pejabat-pejabat NATO dan PfP negara partner yang memiliki kapasitas internasional, berpartisipasi dalam persiapan diskusi politik

dan implementasi keputusan politik yang berhubungan dengan permasalahan militer di dalam PfP.

3.1.3.3. *Organizations and Agencies* (Organisasi dan Lembaga)

Titik awal dari terbentuknya organisasi atau lembaga ini adalah piagam yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab NATO sebagai organisasi antar pemerintah. Badan pengurus biasanya dibentuk untuk mengarahkan pekerjaan sebuah organisasi baru, dan sebuah instansi sering dibuat untuk melaksanakan aktivitasnya. Dalam beberapa kasus, lebih dari satu lembaga bekerja dalam kerangka organisasi. Organisasi NATO dan lembaga meliputi adalah sebagai berikut: (1) *Logistics*; (2) *Production Logistics*; (3) *Standardisation*; (4) *Civil Emergency Planning*; (5) *Air Traffic Management*; (6) *Air Defence*; (7) *Airborne Early Warning*; (8) *Communication and Information Systems*; (9) *Electronic Warfare*; (10) *Meteorology*; (11) *Military Oceanography*; (12) *Research and Technology*; (13) *Education and Training*; (14) *NATO accredited Centres of Excellence*; (15) *Project Steering Committees/Project Offices* (http://www.nato.int/cps/en/SID-F06514F6-06C9BEEA/natolive/structure. htm, di akses pada tanggal 26 Mei 2012).

3.1.4 *Core Task of* NATO

NATO memiliki tiga tugas utama, yang akan dijelaskan melalui sub-bab berikut ini:

3.1.4.1 *Collective Defence*/Pertahanan Kolektif

Prinsip pertahanan kolektif adalah perjanjian utama pada saat pendirian NATO. Ini tetap menjadi prinsip unik dan abadi yang mengikat anggotanya untuk bersama-sama saling melindungi dan menetapkan semangat solidaritas dalam aliansi.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 5 dari *North Atlantic Treaty* yang menyatakan bahwa jika salah satu aliansi NATO adalah korban dari serangan bersenjata, masing-masing dari setiap anggota lainnya yang tergabung dalam aliansi akan mempertimbangkan tindakan kekerasan seperti serangan bersenjata dan akan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk membantu negara aliansi yang menjadi korban peyerangan.

NATO dipanggil Pasal 5 Perjanjian Washington untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah 9/11 serangan teroris terhadap Amerika Serikat (http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_59378.htm, di akses pada tanggal 01 Jniui 2012).

3.1.4.2 *Crisis Management*/Manajemen Krisis

Manajemen krisis merupakan salah satu tugas dasar dari tugas inti NATO untuk menjaga keamanan. Hal ini dapat melibatkan tindakan militer dan non militer untuk menanggapi ancaman, baik itu dalam nasional atau situasi internasional. Salah satu kekuatan NATO adalah memiliki pengalaman, fasilitas, kemampuan dan proses untuk dapat menangani berbagai jenis krisis. Dalam kerangka kerja aliansi, anggota bekerja bersama-sama dan menyiapkan segalanya

sehingga memiliki kesiapan untuk perencanaan, kebijakan, proses, praktek kerja dan alat untuk dapat meluncurkan operasi manajemen krisis multinasional dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, NATO adalah pendukung yang membantu anggota dan mitra untuk beroperasi bersama-sama dalam menjalankan misi dan program.

Peran NATO dalam manajemen krisis adalah operasi militer untuk memasukkan isu-isu seperti perlindungan terhadap populasi alam, operasi bencana teknologi atau kemanusiaan. Krisis efektif seperti politik, militer atau kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik politik atau bersenjata, insiden teknologi atau bencana alam. Manajemen krisis terdiri dari arti yang berbeda untuk berbagai bentuk krisis yang berbeda pula.

Operasi krisis manajemen yang longgar disebut sebagai operasi penjaga perdamaian, tetapi ada berbagai jenis operasi manajemen krisis lainnya yang memiliki tujuan spesifik dan mandat yang penting untuk diketahui untuk memahami dampak, keterbatasan dan jenis operasi. NATO memutuskan apakah akan terlibat dalam operasi manajemen krisis berdasarkan kasus per kasus. Keputusan-keputusan tersebut dibuat berdasarkan keputusan aliansi lainnya melalui konsensus antara negara anggota. Beberapa operasi juga termasuk negara-negara non-NATO dan mayoritas melibatkan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi internasional lain, dalam pendekatan yang lebih global yang komprehensif untuk manajemen krisis.

Instrumen yang dipakai dalam menghadapi krisis manajemen telah disesuaikan dengan visi dan misi NATO dan konsolidasi dari waktu ke waktu merupakan

kunci yang menjadikan NATO terbentuk sampai saat ini. NATO telah aktif memimpin operasi manajemen krisis sejak tahun 1990 dan sejak itu berkembang menjadi organisasi regional yang mampu berkomitmen untuk operasi di luar wilayah Eropa-Atlantik, dan telah menjadi organisasi regional dengan jangkauan global (http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_ 49192.htm, di akses pada tanggal 01 Juni 2012).

3.1.4.3 *Cooperative Security through Partnerships*/Kerjasama Keamanan Melalui Kemitraan

Mengingat tujuan akhir NATO adalah menjaga kebebasan dan keamanan semua anggotanya, NATO menghadapi perubahan yang terus menerus untuk mencerminkan realitas baru untuk meningkatkan dinamisme dan saling ketergantungan. Kepentingan ekonomi, politik, keamanan dan kebutuhan yang saling terkait di tingkat nasional, regional dan internasional. Konsep Strategis baru, yang diadopsi pada KTT Lisbon pada bulan November 2010, memberikan rasa baru untuk peran aliansi, memperkenalkan *Cooperative Security* sebagai tugas inti baru selain pertahanan kolektif yang telah disepakati dan manajemen krisis. Tugas baru ini tentu akan membawa sikap proaktif untuk mencapai harmoni, meningkatkan kerja sama internasional, sinkronisasi upaya untuk menghadapi ancaman multidimensi, dan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Ketidakpastian peristiwa geopolitik dan efek berbeda yang akan dihadapi, sumber daya yang berkurang, frame waktu yang lebih singkat, dan target ambigu, kemudian menekan NATO untuk memastikan

soft and hard power, baik dalam pengaruh politik dan militer. Tujuan tersebut didukung oleh Aliansi yang kemudian mengkoordinasikan jaringan luas terhadap hubungan antar mitra dengan negar non-NATO dan organisasi internasional lainnya di seluruh dunia untuk mencapai *Cooperative Security* dan memastikan keamanan di kawasan Eropa-Atlantik. *Cooperative Security – a network of "security partnership.*

Secara umum *Cooperative Security* terdiri dari tiga komponen, termasuk penguatan kemitraan, memberikan kontribusi bagi pengawasan senjata, non-proliferasi dan perlucutan senjata, dan membantu negara-negara baru yang potensial untuk mempersiapkan diri sebagai anggota NATO. Untuk mengoperasionalkan tugas inti tersebut, aliansi bertindak sebagai koordinator yang juga melibatkan negara atau organisasi internasional lainnya dengan kepentingan umum yang bekerja sama dalam berbagai masalah keamanan. Ini memberikan kerangka kerja bagi dialog politik dan kerjasama regional, meningkatkan interoperabilitas militer dan sangat penting untuk keberhasilan operasi dan misi NATO. Dengan cara ini, dapat dilihat *Cooperative Security* sebagai pendekatan untuk keterlibatan yang menyediakan kolaborasi meningkat antara pelaku yang berbeda sehingga berbagi informasi dan harmonisasi sumber daya dan kemampuan.

Dari perspektif militer, Staf Militer Internasional (IMS) Markas Besar NATO di Brussels menerjemahkan konsep *Cooperative Security* ke dalam bahasa operasional, yang menunjukkan kerja sama militer. Sisi militer kemitraan sangat penting, mengingat bahwa sekitar delapan puluh persen dari kegiatan adalah

kerjasama dan peristiwa yang bersifat militer. IMS mendukung keterlibatan praktis Aliansi melalui kemitraan khusus dengan Rusia, Ukraina, Georgia dan mitra lain di seluruh dunia serta melalui Dialog Mediterania (MD), Kemitraan untuk Perdamaian (PfP), dan *Istanbul Cooperation Initiative* (ICI). Selain itu, staf militer NATO bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE) dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE). Semua kemitraan dengan negara non-NATO dan organisasi internasional didasarkan pada upaya jangka panjang untuk membangun dan memelihara jaringan "keamanan kemitraan" melalui latihan dan kegiatan militer (http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_77718.htm, diakses pada tanggal 01 Juni 2012).

3.1.5 NATO Lama Sebagai *Collective Defense*

Sejak awal terbentuk, NATO merupakan institusi untuk mengamankan kawasan Eropa Barat yang dijamin oleh Amerika Serikat. Institusi ini tidak memiliki struktur organisasi untuk memfasilitasi hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah aliansi militer. Hal tersebut terbukti dengan nihilnya pasukan yang terintegrasi, rencana pertahanan, dan tidak ada tindakan nyata dalam menghadapi serangan Soviet. Namun, tantangan global yang ada seperti keberhasilan Soviet dalam membuat senjata nuklir, kemenangan komunis di Cina, dan perang di Korea membawa dampak besar bagi NATO dan mentransformasinya menjadi sebuah aliansi militer formal.

North Atlantic Council/Dewan Atlantic Utara (NAC) yang terbentuk pada tahun 1949 menjadi otoritas utama dalam aliansi ini dan membuat Komite Pertahanan yang berisikan menteri-menteri pertahanan yang dapat bertanggung jawab akan masalah pertahanan. Komite Militer pun dibuat untuk mempertemukan *chief-of-staff* untuk memberi saran tentang hal-hal berkenaan dengan isu militer.

Menghadapi banyak hal yang terjadi diawal keterbentukannya, pada tahun 1952, akhirnya menteri-menteri dari negara anggota NATO bertemu di Lisbon dan menyetujui untuk membentuk sebuah struktur militer yang didominasi oleh Amerika Serikat, serta membangun sebuah struktur pasukan termasuk dua puluh lima sampai dengan tiga puluh divisi untuk ditempatkan di Eropa Tengah, terutama di Jerman Barat. Jenderal Dwight D. Eisenhower yang menjabat sebagai komandan pertama *Supreme Allied Commander Europe* (SACEUR) memeberikan komentar dengan mengatakan:

> "Merancang sebuah organisasi yang memenuhi aspirasi nasionalis dari dua belas negara yang berbeda atau ambisi pribadi dari individu yang terlibat adalah bisnis yang sangat melelahkan dan menjengkelkan" (Pedlow, 1993: 18).

Dengan begitu, para anggota NATO membuat sebuah birokrasi militer dan politik internasional untuk membantu proses perencanaan pertahanan multilateral. Kemudian dibentuk sebuah organisasi politik oleh negara-negara anggota, dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dengan staff dari negara-negara anggota.

Organisasi militer NATO selama perang dingin didasari oleh komando kawasan terintegrasi dibawah komando dari SACEUR di *Supreme Headquarters*

Allied Powers Europe (SHAPE) yang selalu dipegang oleh seorang Jenderal senior dari Amerika Serikat.

Pertahanan kolektif yang efektif membutuhkan perencanaan militer yang sesuai dengan pertimbangan kepentingan negara-negara lain. NATO ditugaskan untuk mentransaksikan perencanaan *collective defense* dengan menengahi perbedaan diantara kebutuhan *collective defense* dan perencanaan militer. Proses ini diselesaikan lewat siklus perencanaan pertahanan yang dipimpin oleh NATO.

Agar perencanaan tersebut menjadi efektif, NATO harus mempromosikan pengadopsian nasional dari standar umum, yang dapat mendukung pertukaran pasukan dan peralatan militer dan mempromosikan efisiensi dalam perencanaan militer multinasional dan keefektifan operasi militer multinasional. Standarisasi yang diberikan oleh NATO meliputi peralatan militer, komponen militer dan sistem militer, pemeliharaan dan training dari negara-negara anggota.

Komite Sipil dan Militer NATO memainkan peran penting dalam proses perencanaan multinasional, tetapi inisiatif dan implementasi kembali pada tindakan perwakilan-perwakilan negara anggota sesuai dengan instruksi dari pemerintah nasional masing-masing negara (Kay, 1998: 41).

3.1.6 Transformasi NATO Pasca Perang Dingin (1991-2001)

Terdapat beberapa perubahan signifikan di dalam NATO sejak awal keterbentukannya. Sekalipun masih mengusung struktur yang sama, namun ada terjadi perubahan yang semula *collective defense* menjadi aktivitas menjaga perdamaian (yang berarti dengan kata lain sebagai agen kebebasan dan pemelihara

stabilitas), dan lebih mandiri dari Amerika Serikat dengan berusaha menggunakan cara untuk meningkatkan kapabilitas militer Eropa. Dalam transformasinya, ada empat fase besar yang membuat NATO menjadi NATO yang sekarang, yaitu:

Memasuki akhir tahun 1980-an, Uni Soviet terpaksa menarik mundur pasukannya di Eropa dan komunisme di sana berangsur hilang, hanya saja demokrasi pun tidak begitu stabil. Dengan terjadinya perubahan-perubahan tersebut, NATO mulai mencari peran baru, tidak hanya sekedar *collective self-defense* melainkan juga untuk menangani manajemen krisis yang terjadi di luar negara-negara anggota dengan menyediakan pasukan yang dapat ditempatkan di kawasan yang membutuhkan operasi menejemen krisis. Dengan semakin damainya keadaan di Eropa bagian Timur, NATO dengan cepat menerima konsep baru keamanan dan berkomitmen untuk membangun sebuah dialog politik untuk memupuk stabilitas pada perbatasan.

Mereka menyadari bahwa keamanan di setiap negara tidak dapat dipisahkan dari keamanan negara-negara tetangganya. Maka, NATO tidak bisa hanya bergerak dalam bidang pertahanan bersama saja, tetapi harus mulai membangun kerjasama dengan semua negara di Eropa, termasuk negara-negara Eropa Timur. Tetapi, konsep baru keamanan ini tidak dapat menggantikan hilangnya *raison d'etr* NATO yang utama, yaitu ancaman Soviet, dimana peran NATO masih diharapkan untuk mengelola hubungan Trans-Atlantik oleh negara-negara anggota NATO dan negara-negara lain dari Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Krisis yang terjadi di Balkan pada tahun 1991 sampai 1995, tidak memberikan kesempatan bagi NATO untuk berkontribusi terlalu banyak karena tantangan

keamanan baru pada masa itu muncul jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, bahkan pada krisis ini Uni Eropa dan PBB justru menimbulkan lebih banyak masalah di sana daripada memberikan penyelesaian. Walau begitu, NATO kembali menunjukkan taringnya pada konflik Bosnia-Herzegovina pada tahun 1995 sampai 1998 dengan memfasilitasi perdamaian, walaupun kapasitasnya dalam memunculkan keamanan dalam jangka terbatas.

Permasalahan pertama yang harus dihadapi oleh NATO setelah berakhirnya perang dingin adalah *Gulf Crisis* pada tanggal 2 Agustus 1990 bersama dengan Uni Eropa dan PBB yang secara tidak langsung memperkuat kerjasama diantara negara-negara WEU, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Dari sini kemudian lahir instistusi-institusi baru di dalam (atau yang berkaitan dengan) NATO. Salah satunya adalah *North Atlantic Cooperation Council* (NACC), yang terbentuk pada bulan Desember 1991 membawa negara-negara angota NATO bersama dengan sembilan negara dari Eropa Timur dan Eropa tengah di dalam satu forum konsultatif yang baru. NACC ini berkembang dengan cepat, hingga dalam waktu satu tahun berhasil membawa negara-negara persemakmuran dari negara-negara merdeka untuk bergabung.

Di tahun 1992, NATO mengambil langkah dengan mendeklarasikan keinginannya untuk membawa organisasinya dalam aktivitas *peace-keeping* di laut territorial NATO, dibawah tanggung jawab dari *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) dan PBB yang kemudian memprakarsai terbentuknya juga *Euro Atlantic Partnership Council* (EAPC) di tahun 1997, yang berisikan 19 aliansi dan 27 *partners* di dalam satu forum untuk saling

berkonsultasi dan bekerjasama. EAPC ini bertindak sebagai forum konsultasi dalam menangani krisis di Kosovo dan membentuk PfP. Hampir semua negara EAPC yang tidak tergabung di dalam NATO membuat misi diplomasi yang dibawahi NATO. Selain PfP, NATO juga membuat konsep *Combined Joint Task Forces* (CJTF), dan inisiatif *counter-proliferation.*

NATO juga membuat sebuah konsep keamanan di tahun 1991 yang menekankan empat *fundamental tasks* selepas masa Perang Dingin yaitu: (1) menyediakan fondasi penting untuk keadaan keamanan yang stabil di Eropa, sehingga tidak memungkinkan negara lain untuk mengintimidasi atau memaksakan hegemoninya kepada negara-negara Eropa melalu ancaman atau serangan; (2) menyediakan forum bagi aliansi untuk bisa berkonsultasi dan berkoordinasi pada isu apapun yang mempengaruhi kepentingan vital mereka; (3) Untuk melindungi kawasan NATO dari segala bentuk ancaman atau serangan; (4) Untuk memelihara strategi *balance of power* di Eropa.

Namun, di tahun 1999, konsep tersebut harus direvisi dan menghasilkan tujuh *strategic concept* baru bagi NATO yaitu: (1) Pemeliharaan hubungan Trans-Atlantik; (2) Pengelolaan kapabilitas militer yang efektif; (3) Pengembangan identitas keamanan dan pertahanan Eropa di dalam aliansi; (4) Pencegahan konflik dan pengelolaan krisis; (5) *Partnership, cooperation, and dialogue*; (6) Perluasan keanggotaan; (7) Kontrol persenjataan, pelucutan senjata dan non-proliferasi (NATO *handbook,* 2001: 42-47).

Aliansi militer yang dibentuk NATO memainkan bagian penting dalam memfasilitasi transparansi dan kepercayaan antara NATO dan partner-partnernya.

Namun, yang paling penting adalah *operational peacekeeping forces* untuk membentuk manajemen krisis yang efektif dan mengatur pencegahan konflik seperti pembuatan *Bosnian Peace Agreement* yang menyediakan keamanan internasional di Kosovo (sesuai dengan mandat dari PBB).

Krisis-krisis yang bermunculan pasca perang dingin sebenarnya merupakan salah satu pemicu NATO untuk bertransformasi. Seperti di Yugoslavia, krisis ini justru memperkuat hubungan antara NATO, partner-partnernya dan negara-negara lain yang terlibat, dan sekaligus membawa keuntungan untuk keamanan dan stabilitas di Eropa secara keseluruhan. Krisis di Kosovo juga menuntut NATO untuk meluncurkan kekuatan angkatan udara, dan menempatkan KFOR.

Transformasi NATO ini berpengaruh besar pada dua hal di dalam NATO yaitu; pengurangan ukuran dan kesiapan pasukan militer, dan penambahan fleksibilitas, mobilitas dan *multinationality* dari NATO. NATO kemudian mendapat peran baru yaitu sebagai *collective security*, dan menjaga jaringan Trans-Atlantik untuk menjamin kredibilitas dan efektivitas aliansi. *Defense Capabilities Initiatives* (DCI) pun terbentuk di dalam fase ini, termasuk di dalamnya terdapat *European Security and Defense Identity* (ESDI) yang membuat kontribusi aliansi Eropa menjadi kuat dan koheren untuk NATO. DCI berfokus dalam memperbaiki kapabilitas aliansi di dalam 5 *overlapping area*: (1) *mobility and deployability*; (2) *sustainability*; (3) *effective engagement*; (4) *survivability*; dan (5) *interoperable communications* (NATO *handbook*, 2001: 48-52).

3.1.7 NATO Abad Ke-21

3.1.7.1 Konsolidasi Pasca Insiden 9/11

Selain berakhirnya Perang Dingin, insiden 9/11 yang menyebabkan runtuhnya gedung kebanggan Amerika Serikat *World Trade Center* dan Pentagon juga menjadi pemicu utama dalam akselerasi proses transformasi NATO lama menjadi NATO baru. Satu hal yang sangat menonjol mengenai perubahan NATO yang disebabkan oleh insiden 9/11 adalah respon Eropa yang lebih memilih menawarkan landasan bilateral dibandingkan multilateral. Amerika Serikat tidak mau menggunakan NATO untuk merespon serangan 9/11, bantuan negara-negara Eropa yang berdatangan ke Amerika Serikat pun atas kerjasama bilateral, bukan atas nama NATO, walaupun NATO tetap berperan mengawasi patroli di Amerika Serikat.

Insiden ini berbuntut panjang dalam melahirkan pertentangan antar negara-negara anggota NATO, seperti tidak setujunya Perancis dan Jerman dalam invasi Amerika Serikat ke Irak, dan tidak setujunya Perancis, Jerman, dan Belgia untuk memberikan bantuan pada Turki. Hal-hal tersebut memunculkan pertanyaan akan komitmen negara-negara anggota terhadap artikel 4 dan artikel 5 dari Traktat Atlantik Utara (Bensahel, 2003: 15-22).

NATO lalu mulai merubah pemikiran dan tidak berfokus pada “respon cepat” dalam suatu isu tertentu, tetapi juga mempertimbangkan tantangan jangka panjang yang disebabkan oleh tantangan keamanan tersebut. Amerika Serikat dan Perancis akhirnya sepakat untuk tetap menggunakan *strategic concept* yang lama dengan

menambahkan *countering terror* sebagai tugas utama NATO karena hal ini berdampak pada kepentingan keamanan vital dari seluruh negara anggota.

Untuk menjelaskan peran NATO dalam *counter terrorism*, pertemuan untuk membahas hal ini segera dilakukan, dan akhirnya disepakatilah ide yang diajukan oleh negara Perancis yaitu: “NATO harus mampu menjaga kekuatan di lapangan yang bisa bergerak cepat dimanapun mereka dibutuhkan, mempertahankan operasi yang berkesinambungan tanpa terhalang jarak dan waktu untuk mencapai tujuan mereka" (Final Communiqué: Ministerial Meeting of the North Atlantic Council Held in Reykjavik on 14 May 2002, Press Release M-NAC-1 (2002) 59, May 14, 2002).

Untuk memerangi terorisme dalam jangka pendek, NATO mempersiapkan *internal terrorism task force*. Sementara rencana jangka panjangnya adalah dengan meluncurkan inisiatif kapabilitas yang baru seperti *NATO Rapid Response Force,* memasukkan isu tentang ancaman senjata pemusnah masal, membenahi *civil-military emergency planning and consequence management*, serta memperkuat hubungan kerjasama dan training dengan partner-partner yang ada.

SACEUR dan SACLANT pun ditugaskan untuk membuat sebuah konsep pertahanan melawan terorisme bernama *Military Concept for Combating Terrorism*. Konsep ini diterima pada *Prague Summit* di bulan November 2002 yang terdiri dari empat pillar yaitu: (1) *antiterrorism*; (2) *consequence management*; (3) *counterterrorism*; dan (4) *military cooperation with civil authorities*.

Di dalam *Prague Summit* (KTT Praha) pemimpin NATO memperkenalkan perubahan besar yang membentuk ulang aset militer NATO. DCI yang dibuat tahun 1999 dianggap terlalu luas dan tidak fokus. Di *Prague Summit*, NATO secara resmi mengadposi sebuah inisiatif kapabilitas yang baru yang dikenal dengan nama *Prague Capabilities Commitment* (PCC), yang menekankan pada perbaikan kapabilitas dalam 8 area spesifik yaitu: (1) pertahanan melawan senjata kimia, biologi, nuklir dan radioaktif; (2) *intelligence, surveillance, and target acquisition*; (3) pengawasan udara dan darat; (4) komando, kontrol, dan komunikasi; (5) efektivitas serangan, termasuk pelatihan persenjataan dan gencean dari serangan udara; (6) strategi udara dan laut; (7) *air-to-air refueling*; (8) penyebaran dukungan pertempuran dan pelayanan unit pendukung pertempuran (Bensahel, 2003: 25-27).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa NATO mengalami pergeseran dari sebuah organisasi yang hanya berfokus pada permasalahan militer menjadi sebuah organisasi yang juga menyadari bahwa isu isu kemanusiaan juga merupakan hal krusial di dalam sektor keamanan. Hal ini dapat dilihat dalam DCI dan tujuh *new strategic concept* NATO yang menyebutkan hal-hal seperti kerjasama dengan pemerintah sipil, komunikasi, *effective engagement*, kerjasama, *partnership*, dan dialog sebagai hal-hal yang harus dilakukan oleh NATO untuk mencegah terjadinya konflik dan menjaga perdamaian tetap berlangsung (*Prague Summit Declaration*, NATO *Press Release* (2002) halaman 127, November 21, 2002).

3.2 Gambaran Umum Negara Libya

3.2.1 Profil Negara Libya

Libya termasuk negara terbesar keempat di Afrika dan ke-17 terbesar di dunia dengan luas wilayah 1.759.540 km persegi. Libya adalah negara dengan dataran rendah, yang sebagian besar adalah gurun dengan area sedikit lebih besar dari negara bagian Alaska. Berbatasan dengan Laut Mediterania disebelah utara, timur oleh Mesir dan Sudan, di selatan berbatasan dengan Chad dan Niger, dan di sebelah barat dengan negara Aljazair, dan berbatasan dengan Tunisia disebelah barat laut, dengan panjang batas total lahan dari 4.348 km (2.702 mil) dan garis pantai sepanjang 1.770 km (1.100 mil).

Libya memiliki 66 kota dengan kota ibukota Libya, Tripoli yang menjadi pusat pemerintahan Khadafi. Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), populasi Libya pada 2005 diperkirakan berjumlah 5.766.000, yang berada diurutan nomor 106 dari 193 negara di dunia. Pada tahun 2005, sekitar 4% dari populasi berumur lebih dari 65 tahun, dengan yang lain 35% dari populasi di bawah 15 tahun. Populasi Libya diproyeksikan mencapai 8 .323.000 pada tahun 2025. Kepadatan populasi secara keseluruhan adalah 3 per km^2, tetapi 90% dari penduduk Libya tinggal di daerah pesisir seperti Cyrenaica dan Tripolitania (St. John, 1998: 16).

Dari jumlah penduduk tersebut, 97% diantaranya adalah orang Arab dan Beber dengan mayoritas penganut muslim sunni. Menurut konstitusi, islam adalah agama resmi Libya, dan pemerintah secara terbuka mendukung preferensi untuk praktik Islam moderat. Bahasa nasional Libya adalah bahasa arab yang resmi digunakan sejak tahun 1969, bahkan pemerintah telah membuat keputusan bahwa

penggunaan bahasa arab juga akan dipakai oleh orang asing. Namun, bahasa inggris juga tetap digunakan dalam beberapa publikasi pemerintah. Bahasa berber tetap dituturkan oleh komunitas kecil, khususnya di Tripolitania. Penutur asli merupakan sekitar 5% dari populasi (http://www.encyclopedia.com/topic/Libya .aspx, diakses pada tanggal 03 Juni 2012).

Libya adalah satu satu negara didunia yang mempunyai sumber daya alam yang sangat baik dengan *main exports* seperti minyak mentah, industry minyak dan gas alam. Menurut survey *World Bank* tahun 2009, GNI per capita mencapai US $12,320 (http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13754898, di akses pada tanggal 24 Mei 2012).

3.2.2 Sejarah Libya

Libya yang terletak di wilayah Maghrib Afrika Utara adalah sebuah kerajaan yang merdeka pada 24 Desember 1951. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa kebudayaan neolitik, yang terampil dalam mengurus ternak dan budidaya tanaman, ada semenjak 6000 SM di sepanjang pantai Libya. Di sebelah selatan, di tempat yang kini dinamakan Sahara, pemburu dan gembala berkeliaran yang kemudian mengalirkan pengairan savana. Meningkatkan pengawetan melalui proses pengeringan telah dikenalkan oleh kaum Berber sekitar 2000 SM dari barat daya Asia. Para fir'aun dari dinasti Libya yang memerintah Mesir (950-720 SM) diperkirakan adalah bangsa Berber. Pelaut Fenisia yang mendirikan pemukiman di sepanjang pantai pada awal milenium pertama SM, kini menjadi salah kota terbesar di Libya, Tripoli.

Sekitar abad ke-7 SM, kolonis Yunani menetap di Cyrenaica. Pada abad berikutnya, pemukiman barat jatuh di bawah kekuasaan Kartago; pemukiman timur jatuh ke dinasti Mesir dari dinasti Ptolemaic di abad ke-4 SM. Ketika Roma mengalahkan Kartago dalam Perang Punisia abad ke-3 dan ke-2 SM, mereka menduduki daerah sekitar Tripoli. Pada 96 SM, mereka memaksa Mesir untuk menyerahkan Cyrenaica, dan pengaruh Romawi kemudian diperluas hingga ke selatan sejauh kota Fezzan. Libya menjadi sangat makmur di bawah kekuasaan Romawi, dengan jatuhnya Roma, Libya bagian barat jatuh pada abad ke-5 dibawah kendali kolonel Jerman Vandal Ivanders, yang memerintah dari Kartago. Pada abad ke-6, Bizantium menaklukkan Vandal dan menguasai wilayah pantai Libya sampai penaklukan Arab pada abad ke-7. Orang-orang Arab bercampur dengan Berber, yang secara bertahap diserap ke dalam budaya Arab Muslim.

Bagian barat Libya diberikan oleh Aghlabids Tunisia di abad ke-9, dan oleh Fatimiyah dari Tunisia kemudian Mesir pada abad ke-10. Selama abad ke-11, invasi oleh dua orang Arab nomaden, yaitu Hilal Bani dan Bani Sulaym, menghancurkan banyak daerah perkotaan dan pertanian. Normandia Sisilia menduduki Tripoli dan daerah sekitarnya tapi segera digantikan oleh Muwahidun Maroko; selama abad ke-13, Hafsids Tunisia memerintah barat Libya. Daerah timur tetap tunduk pada dinasti Mesir. Pada abad ke-16, penjajah Spanyol merebut bagian pantai, menyerahkan kendali Tripoli kepada Ksatria Perang Salib, Ordo St John dari Yerusalem. Orang-orang Turki Ottoman menduduki daerah pesisir pada tahun 1551, memerintah negara itu sampai 1711, ketika Ahmad Qaramanli, asal Turki, merebut status semiotonom dari Istanbul. Kapten bajak

laut dari Istanbul kemudian beroperasi didaerah Tripoli, menyerbu Mediterania dan pantai Italia. Para Qaramanlis memerintah sampai 1835, ketika Ottoman kembali memegang kendali atas wilayah Libya.

Pada bulan September 1911, orang Italia menginvasi Libya, dan menemukan perlawanan sengit dari pihak Turki dan penduduk pribumi Libya. Sebuah perjanjian damai dari 17 Oktober 1912 antara Turki dan Italia menempatkan Libya secara resmi di bawah pemerintahan Italia, tapi Libya melanjutkan perlawanan mereka. Dipimpin oleh persaudaraan agama Islam, Sanusi, Libya (dengan bantuan Turki) melawan Italia selama Perang Dunia I. Setelah perang, dan terutama setelah aksesi dari Benito Mussolini berkuasa di Italia, orang Italia terus menerus melakukan aksi brutal sebagai upaya menaklukkan Libya. Pada tahun 1931, Umar al-Mukhtar, pemimpin dari Sanusi, ditangkap dan dieksekusi oleh Italia, dan penaklukan terhadap Libya selesai pada tahun 1932. Dalam Perang Dunia II, Libya menjadi medan pertempuran utama bagi Sekutu dan pasukan Axis, sampai diduduki oleh tentara Perancis dan Inggris. Perjanjian pada tahun 1947 antara Italia dan Sekutu mengakhiri kekuasaan Italia di Libya dan ketika Sekutu tidak bisa memutuskan masa depan negara, nasib Libya diserahkan kepada PBB. Pada tanggal 21 November 1949, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Libya harus menjadi sebuah negara merdeka. Pada tanggal 24 Desember 1951, kemerdekaan Libya diumumkan, Muhammad Idris al-Mahdi as-Sanusi (Raja Idris 1) yang menduduki ketua sanusiyyah terpilih menjadi raja.

Pada tanggal 1 September 1969, sebuah organisasi militer rahasia yang menamakan diri sebagai *Free Unionist Officers,* menggulingkan Raja Idris I dan

memproklamirkan sebuah rezim republik untuk Libya. Pada tanggal 8 September, Komando Dewan Revolusi (RCC) mengumumkan pembentukan pemerintah sipil. Pemerintahan ini mengundurkan diri pada tanggal 16 Januari 1970, dan kabinet baru dibentuk di bawah Kolonel Mu'ammar al-Khadafi yang pernah menjadi ketua RCC. Pada tanggal 15 April 1973, Khadafi menyerukan "revolusi budaya" berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menjadi awal terbentuknya ratusan "komite rakyat" untuk mengawasi semua sektor kehidupan bangsa politik, budaya, dan ekonomi (http://www.encyclopedia.com/topic/Libya .aspx, diakses pada tanggal 03 Juni 2012).

3.2.3 Pemerintahan Libya

Ada dua cabang pemerintahan di Libya, pertama “Sektor Revolusioner” terdiri dari pemimpin revolusi Khadafi, Komite Revolusioner dan anggota lainnya dari 12 orang Dewan Komandan Revolusioner, yang didirikan pada tahun 1969. Kepemimpinan revolusioner tidak dipilih dan tidak bisa dikeluarkan dari kantor; mereka berada dalam kekuasaan berdasarkan keterlibatan mereka dalam revolusi.

Sektor kedua, Jamahiriyah, terdiri dari Kongres Rakyat Dasar di masing-masing 1.500 kota, 32 Kongres Rakyat Sha’biyat untuk daerah, dan Kongres Nasional Rakyat Umum. Badan legislatif yang diwakili sesuai lembaga eksekutif (Komite Rakyat Daerah, Komite Rakyat Sha’biyat dan Nasional Komite Rakyat Umum/Kabinet) (Tamburaka, 2011:224).

3.2.4 Keterlibatan Libya dalam Organisasi Internasional

Sebagai negara merdeka yang sudah mendapat pengakuan internasional, Libya juga termasuk anggota dan berpartisipasi dalam kelompok-kelompok/organisasi internasional, seperti; Uni Afrika, *Arab Bank for Economic Development in Africa* (ABEDA), *African Development Bank* (AfDB), *Arab Fund for Economic and Social Development* (AFESD), *Arab League* (LA), *Uni Moneter Fund* (UMF), *Arab Maghreb Union* (AMU), *Council of Arab Economic Community* (CAEU), *Bea Cooperation Council* (BCC), *Economic Comission of Africa* (ECA), *Food and Agriculture Organization* (FAO), *Group of 77 at United Nations* (G-77), *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *International Bank for Rekonstruktion and Development* (IBRD), *International Civil Aviation Organization* (ICAO), *International Committee for Radionuclide Metrology* (ICRM), *International Development Association* (IDA), *Islamic Development Bank* (IDB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), *International Finance Corporation* (IFC), *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRCS), *International Labour Organization* (ILO), *International Monetary Fund* (IMF), *International Maritime Organization* (IMO), *International Telecommunications Satellite Organization* (INTELSAT), *International Criminal Police Organization* (INTERPOL), *Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), International Standardization Organization*(ISO), *International Telecommunication Union* (ITU), *Non-Aligned Movement* (NAM), *Organization of Arab Petroleum Exporting Countries* (OAPEC), Organisasi Konferensi Islam (OKI), *Organization of the Petroleum*

Exporting Countries (OPEC), *The Community of Sahel-Saharan States* (CENSAD), *Permanent Court of Arbitration* (PCA), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), *Universal Postal Union* (UPU), *World Federation of Trade Unions* (WFTU), *World Health Organization* (WHO), *World Intellectual Property Organisation* (WIPO), *World Meteorology Organization* (WMO), *United Nations World Tourism Organisation* (UNWTO), *World Trade Organization* (WTO-Pengamat) (http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-bycountry/country-profile/middle-east-northafrica/libya/?profile=geography, diakses pada tanggal 24 Mei 2012).

3.3 Profil Muammar Al-Khadafi

Mantan presiden Libya ini mempunyai nama lengkap Muammar Abu Minyar al-Khadafi. Lahir di kota Surt, Tripolitania, pada tanggal 7 Juni 1942. Khadafi berasal dari keluarga suku Badawi (Badui) di Daerah Gurun Pasir di kota kecil Sirte. Seperti suku-suku yang hidupnya berpindah-pindah, suku badui berpindah dari satu gurun ke gurun lainnya sembari mengembalakan kambing. Khadafi lahir di tenda pengembaraan keluarganya.

Meski hidup di tengah kehidupan *nomaden*, Khadafi tetap melanjutkan pendidikan. Pada tingkat sekolah dasar, Khadafi mengenyam pendidikan tradisional yang berbasis keagamaan, dan pada tahun 1956 hingga 1961, dia

bersekolah di SMU Sebha di Fezzan, salah satu kota di Libya yang merupakan pusat pendidikan dari dulu sampai sekarang (Agung, 2011: 9-10).

Khadafi memiliki satu orang istri yang bernama Safia el-Brasai (1971–2011), sedangkan, sebelumnya dia pernah bercerai dari Fatiha al-Nuri yang dinikahinya tahun 1969, namun bercerai pada tahun 1970 dan memiliki 1 orang anak, yaitu Muhammad Khadafi. Di pernikahan keduanya, Khadafi dikaruniai tujuh orang anak, enam di antaranya lelaki. Putra tertuanya, Muhammad Khadafi adalah ketua komite olimpiade Libya. Putra kedua, Al-saadi Khadafi, adalah ketua federasi sepak bola Libya, bermain di tim seri A, Perugia, dan juga bermain film. Satu-satunya putri Khadafi, Aisyah Khadafi, adalah seorang pengacara yang telah bergabung dengan tim pengacara Saddam Hussein (Tamburaka, 2011: 221).

Khadafi juga diketahui memiliki kekayaan yang melimpah, salah satunya mempunyai saham sebesar 7,5% di klub sepak bola Italia, Juventus (http://www.biografitokohdunia.com/2011/01/biografi-muammar-Khadafi.html, di akses pada tanggal 26 Mei 2012).

3.3.1 Rezim Muammar al-Khadafi

3.3.1.1 Mengawali Karir Sebagai Pemimpin Revolusi

Pada saat kelahirannya, Libya adalah sebuah koloni Italia. Pada tahun 1951, Libya merdeka di bawah Barat sekutu Raja Idris I. Sebagai seorang pemuda, Khadafi dipengaruhi oleh gerakan nasionalis Arab, dan mengagumi sosok pemimpin Mesir pada saat itu, Gamal Abdel Nasser. Pada tahun 1961 dia masuk ke perguruan tinggi militer di kota Benghazi. Khadafi menghabiskan empat bulan

untuk pelatihan militer di Inggris. Setelah lulus, Khadafi terus mengalami kemajuan pesat di jajaran militer. Ketidakpuasan terhadap Raja Idris I mulai tumbuh, Khadafi kemudian memimpin gerakan oposisi politik yang kemudian terlibat dengan gerakan perwira muda Libya untuk menggulingkan Raja Idris I.

Pada tanggal 1 September 1969, Raja Idris I digulingkan ketika pemimpin Libya tersebut melakukan perawatan medis di Turki. Khadafi kemudian menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan ketua Dewan Komando Revolusi, dan pada tahun 1970, Khadafi resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Pertama Republik Libya. Hal tersebut menjadikan Khaafi sebagai penguasa Libya pada usianya yang masih 27 tahun (Agung, 2011: 13).

3.3.1.2 Libya di Bawah Rezim Muammar al-Khadafi (1975-2005)

Khadafi berusaha membuat Libya menjadi sumbu untuk bersatunya bangsa Arab dikawasan Timur Tengah. Pada tahun 1972 Khadafi memproklamirkan "*Federation of Arab Republic*" (PAN) yang beranggotakan Mesir, Tunisia, Suriah, dan Sudan. Namun, sepertinya hubungan baik ini hanya terjadi diatas kertas saja, karena hubungan Libya selanjutnya dengan negara-negara Arab, termasuk Mesir dan Tunisia, sering kali mengalami ketegangan, seperti membelotnya Presiden Mesir, Anwar Saddat dari Liga Arab ke Washington yang menjadi cikal perundingan damai antara Mesir dan Israel di Camp David, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 17 September 1978, dimana Mesir mengakui adanya negara Israel di wilayah Arab. Hal ini tentu membuat hubungan Anwar Saddat dan Khadafi memburuk, karena salah satu tujuan Khadafi membuat

PAN adalah untuk membantu negara Arab yaitu Palestina keluar dari jajahan Israel serta membebaskan diri dari Amerika. Namun, membelotnya Anwar Saddat tidak lantas melunturkan keinginan Khadafi yang tetap memilih membantu Palestina (Agung. 2011-31-33).

Khadafi juga mengaktifkan Libya dikawasan Afrika. Pada tahun 1973, dia berusaha menganeksasi Jalur Aouzou, daerah yang diyakini memiliki deposito kaya uranium dari negara Chad. Pada tahun 1979, pasukan bersenjata Khadafi gagal untuk mencoba menopang rezim Idi Amin yang menjabat sebagai pemimpin Uganda. Libya mengirim lebih dari 10.000 tentara ke Chad pada tahun 1980 dalam mendukung rezim Goukouni Oueddei, dan mengusulkan untuk penyatuan kedua negara tersebut. Tekanan kuat dari internasional yang mengkritisi keterlibatan Khadafi di Chad menyebabkan penarikan pasukan militer Libya pada November 1981.

Setelah jatuhnya rezim Oueddei pada bulan Juni 1982, Khadafi memberikan dukungan militer untuk membantu Oueddei kembali menguasai Chad. Libya dan pasukan Oueddei mengendalikan sebagian negara dari utara Chad sampai tahun 1987, namun, ketika pasukan Chad akhirnya dapat menjatuhkan pasukan Khadafi, menangkap, menghancurkan sekitar $1 milyar peralatan militer Libya, serta menyerang basis-basis di dalam Libya sendiri. Akhirnya, pada tahun 1989, setelah mengakui kesalahannya dalam gerakan ke Chad, Khadafi sepakat untuk gencatan senjata dan pengajuan sengketa Jalur Aouzou ke Pengadilan Internasional Keadilan. Pengadilan menetapkan Jalur Auzou sebagai bagian dari negara Chad pada tahun 1994.

Khadafi telah dituduh mendukung plot subversif di negara-negara seperti Maroko, Niger, Sudan, Mesir, Tunisia, Ghana, Burkina Faso, Nigeria, Gambia, Somalia, Senegal, dan Mali dan memberikan bantuan material untuk berbagai kelompok perlawanan, termasuk Tentara Republik Irlandia, pemberontak Muslim di Filipina, dan teroris Jepang dan Jerman. Khadafi memang masih didukung oleh minoritas, seperti negara-negara miskin di Afrika hitam yang sangat bersemangat untuk menerima bantuan Libya.

Pada tahun 1982, Khadafi mengalami kemunduran ketika pertemuan puncak tahunan *Organisation of African Unity* (OAU) gagal terlaksana. Pertemuan yang dijadwalkan akan diadakan di Tripoli ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kebijakan Libya di Chad dan dukungannya pada gerilyawan Polisario di Sahara Barat. Akibatnya, Khadafi ditolak masa jabatannya sebagai ketua OAU. Sebaliknya, pada bulan Februari 1997 Dewan Keamanan PBB memberi sanksi terhadap Libya atas kasus pemboman Lockerbie, Dewan Kementerian OAU bertemu di Tripoli, pertemuan pertama ini telah diselenggarakan di luar kantor pusat di Addis Ababa, Ethiopia (http://www.encyclopedia.com/topic/Libya .aspx, diakses pada tanggal 03 Juni 2012).

Tahun 1951, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Libya dan disusul peningkatan hubungan bilateral sampai tingkat kedutaan. Hubungan Libya-Amerika Serikat terhenti ketika Muammar Khadafi mengambil alih kekuasaan Libya. Khadafi yang telah berpangkat Kolonel melancarkan Revolusi Budaya yang mengandung inti penyingkiran semua

ideologi dan pengaruh asing, dan kemudian melengkapinya dengan kapitalisme dan komunisme. Khadafi juga mengembangkan masyarakat baru berdasarkan sosialisme Libya dengan semboyan "Sosialisme, Persatuan, dan Kebebasan". Semboyan tersebut adalah hasil pemikiran Khadafi yang terdapat dalam buku "*Green Book*" yang dia tulis dan dipublikasikan pada tahun 1975. Bahkan, buku yang terdiri dari 3 jilid tersebut merupakan bacaan wajib setiap warga negara Libya. *Green Book* berisi tiga bagian pernyataan dari Teori Internasional Ketiga. Filosofi-filosofi tersebut adalah cerminan dari gaya kepemimpinan Khadafi di Libya. Teori Internasional Ketiga adalah dasar teoritis untuk institusi dan kebijakan Jamahiriyya. Bagian pertama, yang dikeluarkan pada tahun 1976 yang berjudul, "Solusi dari Masalah Demokrasi: Otoritas Rakyat," membahas dilema pemerintahan yang adil dan bijaksana dan menyatakan solusi yang benar untuk mengatur rakyat adalah melalui kongres dan komite . Bagian 2 buku tersebut membahas tentang "Solusi dari Masalah Ekonomi: Sosialisme," panggilan yang muncul pada tahun 1978, untuk akhir eksploitasi yang tersirat dalam masalah upah dan sewa, mendukung kemitraan ekonomi dan wirausaha. Bagian 3 berjudul "Dasar Sosial Teori Internasional Ketiga," yang menjelaskan tentang perlakuan masalah sosial, termasuk pentingnya keluarga dan suku, status perempuan dan kaum minoritas (Agung, 2011:58-59).

Semenjak hubungan kedua negara semakin memburuk dan mencapai titik terendah. Massa anti-AS menggelar demonstrasi pro-Iran pada Desember 1979. Massa membakar gedung kedutaan besar AS di Tripoli yang menjadi awal dari demonstrasi tersebut. Masih pada Tahun 1979, pesawat-pesawat tempur AS

menembak jatuh pesawat tempur Libya di Atas Teluk Sidra. Insiden itu memperburuk hubungan kedua negara. Beberapa kalangan internasional menyatakan bahwa Libya sebagai "Negara sponsor terorisme", yang menjadi awal untuk AS menutup kedutaannya di Tripoli pada Februari 1980 dan menyusul Libya yang menutup kedutaannya di Washington.

Pada Januari 1986, Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan memerintahkan penghentian hubungan dagang dan ekonomi terhadap Libya. Langkah tersebut disusul dengan pembekuan aset-aset Libya di AS. Bukan hanya menutup diplomatik, keuangan dan perdagangan, tapi juga berusaha menyingkirkan Khadafi. Pesawat-pesawat tempur AS memborbardir Tripoli, Benghazi, dan rumah Khadafi pada April 1986. Tindakan itu sebagai balasan atas pemboman sebuah diskotik di Berlin Barat yang dipakai sebagai tempat hiburan tentara AS.

Gempuran pesawat tempur AS menewaskan setidaknya 15 orang, termasuk putri Khadafi yang masih kanak-kanak. Posisi Libya makin tersudut menyusul terjadinya ledakan pesawat Pan AM Nomor penerbangan 103 pada Desember 1988. Pesawat Yang berangkat bahasa dari London menuju New York meledak di Atas Lockerbie (Skotlandia) dan menewaskan 259 orang di pesawat serta 11 orang lainnya tewas di darat. Akibat tindakan itu, Dewan Keamanan PBB menerbitkan Resolusi 748 Dan 883 pada Tahun 1992/1993. PBB menjatuhkan sanksi Atas Libya, membekukan aset-asset, dan mengembargo perlengkapan penambangan minyak secara selektif.

Tahun 1999, Libya menyatakan bertanggung jawab atas tragedi Lockerbie. Tripoli menyerahkan terdakwa peledakan pesawat untuk diadili di Belanda Dan

bersedia membayar ganti rugi kepada keluarga korban senilai 2,7 Miliar dolar AS pada tahun 2003. Atas langkah ini, Dewan Keamanan PBB mencabut sanksi dan hal tersebut mendapat dukungan dari AS.

Sikap Amerika Serikat berubah ketika Khadafi mengakui bahwa Libya mengembangkan senjata pemusnah massal. Pengakuan dan tekad tersebut kembali membekukan hubungan Tripoli-Washington. Sejak kedua negara meningkatkan *Land Afiliasi Metropolitan* dan berusaha menyingkirkan hambatan hubungan diplomatik, pajak tangguhan minyak dilaporkan ke Libya. Keputusan Washington pada 15 Mei 2006 untuk memulihkan hubungan diplomatik memang mengejutkan karena Libya dinilai membantu terorisme. Tetapi, ada faktor politik dan positif di balik mencairnya hubungan Khadafi dan Presiden George W Bush (http://www.biografitokohdunia.com/2011/01/biografi-muammarKhadafi.html, di akses pada tanggal 25 Mei 2912).